

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih ditemukannya berbagai kendala pada setiap indikator implementasi kebijakan.

Pada indikator **komunikasi**, penyampaian informasi kepada aparat pelaksana telah berjalan melalui rapat koordinasi, APP, arahan pimpinan, serta penyampaian data perizinan sebelum kegiatan penertiban. Namun, komunikasi kepada masyarakat dan pelaku usaha belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum didukung oleh sosialisasi yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga informasi mengenai prosedur perizinan dan aturan pemasangan reklame belum diterima secara merata.

Pada indikator **sumber daya**, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan penertiban reklame. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan, terutama pada kelengkapan alat pengaman, peralatan khusus untuk penertiban

reklame berisiko tinggi, serta belum adanya alokasi anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan penertiban reklame.

Pada indikator **disposisi pelaksana**, aparat Satpol PP telah menunjukkan komitmen, tanggung jawab, profesionalisme, dan responsivitas dalam melaksanakan penertiban sesuai SOP. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosial, seperti kondisi reklame yang sulit dijangkau, keterbatasan peralatan, serta adanya penolakan dari pihak yang melakukan pelanggaran.

Pada indikator **struktur birokrasi**, pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame telah didukung oleh SOP, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi antara Satpol PP, DPMPTSP, dan Bapenda. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya karena integrasi data status perizinan dan masa berlaku reklame antarinstansi masih belum optimal, sehingga proses verifikasi di lapangan belum dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Secara keseluruhan, implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun kebijakan telah dilaksanakan dan didukung oleh komitmen aparat serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan, masih terdapat berbagai kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, peningkatan kelengkapan sarana penertiban, serta penguatan

integrasi data dan koordinasi antarinstansi agar implementasi kebijakan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin dapat berjalan lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai aturan pemasangan dan penertiban reklame kepada masyarakat serta pelaku usaha secara terstruktur dan berkala. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial resmi, media informasi publik, pertemuan dengan pelaku usaha, maupun penyampaian informasi secara langsung agar masyarakat memahami prosedur perizinan, lokasi pemasangan yang diperbolehkan, masa berlaku izin, dan konsekuensi terhadap pelanggaran.
2. Bagi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana, khususnya alat pengaman keselamatan dan peralatan khusus untuk menertibkan reklame yang berukuran besar, berada di tempat tinggi, atau berdekatan dengan jaringan listrik. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penertiban sekaligus mengurangi risiko keselamatan petugas.
3. Bagi Satpol PP, DPMPTSP, dan Bapenda Kabupaten Bojonegoro, perlu memperkuat koordinasi dan integrasi data mengenai status perizinan, masa berlaku, dan kewajiban pajak reklame. Data yang terintegrasi dan mudah diakses akan membantu petugas melakukan verifikasi secara cepat serta mengurangi ketergantungan pada stiker izin yang dapat rusak atau terlepas.

4. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pemasangan reklame dengan mengurus perizinan, memperhatikan masa berlaku izin, dan memasang reklame pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan. Masyarakat dan pelaku usaha juga perlu aktif mencari informasi kepada instansi terkait sebelum melakukan pemasangan reklame.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan reklame atau mengevaluasi sistem perizinan dan pengawasan reklame secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan lebih banyak pelaku usaha untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pemasangan reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- By Admin. (2023). *Satpol PP Bojonegoro menertibkan banner/reklame yang melanggar*. <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/418>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth). SAGE Publications Inc.
- Eka Yonavilbia. (n.d.). *Satpol PP Bojonegoro Lakukan Penertiban untuk Ciptakan Ketenteraman*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/880597/index.html>
- George C. Edward III. (1980). *Implementing Public Policy* (Vol. 32, Issue 3).
- Indraswari, R. H., & Ilyas, A. (2011). *MEKANISME KOORDINASI INSTANSI TERKAIT DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG*. https://bandung.lan.go.id/uploads/download/1763623858_122-2011---PM_Penyelenggaraan-Reklame_AnitaRida.pdf
- Irawan, A. S. (2024). *PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME TANPA IZIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT*. [http://eprints.ipdn.ac.id/19728/1/REPOSTORY ALDY %281%29.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/19728/1/REPOSTORY_ALDY%281%29.pdf)
- Irwanto, Y., & Kristiana, N. (2022). *Strategi komunikasi visual tokki jantan era 4.0*. 4(1), 148–161.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Effect of Packaging on Perceived Quality and Brand Loyalty: The Mediating Role of Brand Association in Over-the-Counter Market*. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3155681>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). *Public Policy Implementation*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). *PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR*. 5(1), 1–24.
- Putri, I. T. (2023). *IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 81 TAHUN 2017 TERHADAP PENERTIBAN REKLAME TANPA IZIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SIDOARJO*.
[http://digilib.uinsa.ac.id/65430/2/Intan Tiara Putri_C97219032 OK.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/65430/2/Intan%20Tiara%20Putri_C97219032%20OK.pdf)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).
- Yusup, M. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PENGAWASAN REKLAME OLEH SATPOL PP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH DKI JAKARTA*.
[https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/261/1/Muhammad Yusup-15010038.pdf](https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/261/1/Muhammad%20Yusup-15010038.pdf)